



**SATUAN TUGAS PERCEPATAN SOSIALISASI  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Nomor : S-234/Set-SATGAS/UUCK/10/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Undangan Daring *Launching* Buku

15 Oktober 2024

**Kepada Yth.**

(Daftar Undangan terlampir)  
di Tempat

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2022, akan diselenggarakan *Launching* Buku, pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai (Susunan Acara Terlampir)  
Tempat : Meeting ID: 950 7653 1058  
Passcode: 171710  
Agenda : *Launching* Buku: "Harmonisasi Kebijakan dan Transformasi  
Keberlanjutan: Jejak Langkah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja"

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan ini, kami mengharapkan kehadiran Ibu/Bapak untuk berkenan hadir atau menugaskan pejabat/pegawai dalam kegiatan dimaksud **secara daring**. Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui *Hotline* Satgas UUCK (WhatsApp 0888-8392-537). Untuk konfirmasi kehadiran dapat mengisi tautan berikut <https://bit.ly/satgasuuck1024>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Sekretariat  
Satgas Undang-Undang Cipta Kerja

*Eka Denny Mansjur*  
**Eka Denny Mansjur**

Tembusan:

1. Ketua Satgas Undang-Undang Cipta Kerja
2. Sekretaris Satgas Undang-Undang Cipta Kerja

## **DAFTAR UNDANGAN**

**1. Kementerian Sekretariat Negara**

- a. Deputi bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum
- b. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
- c. Asisten Deputi Bidang Perekonomian
- d. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
- e. Asisten Deputi Bidang Administrasi Hukum
- f. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

**2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

- a. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- c. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
- d. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Badan Milik Negara
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
- f. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.
- g. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.
- h. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi
- i. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi
- j. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- k. Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- l. Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

**3. Sekretariat Kabinet**

- a. Deputi bidang Kemaritiman dan Investasi
- b. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- c. Deputi Bidang Perekonomian
- d. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
- e. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

**4. Kementerian Hukum dan HAM**

- a. Dirjen Administrasi dan Hukum Umum
- b. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama

**5. Kementerian Investasi/BKPM**

- a. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- b. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
- c. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
- d. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
- e. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
- f. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi
- g. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- h. Direktur Pemberdayaan Usaha
- i. Kepala Biro Hukum
- j. Direktur Sistem Perizinan Berusaha
- k. Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
- l. Direktorat Kerjasama Bilateral
- m. Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa

**6. Kantor Staf Presiden**

- a. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden
- b. Deputi Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM

- c. Ketua Tim Kantor Staf Presiden untuk Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan UUCK dan Aturan Pelaksanaanya
  - d. Ketua Tim Kantor Staf Presiden untuk Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
- 7. Kementerian Ketenagakerjaan**
- a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  - b. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - c. Kepala Biro Hukum
- 8. Kementerian Keuangan**
- a. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)
  - b. Direktur Jenderal Pajak
  - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- 9. Kementerian Perindustrian**
- a. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
  - b. Kepala Biro Hukum Kementerian Perindustrian
  - c. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
  - d. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- 10. Kementerian Perdagangan**
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
  - b. Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan
  - c. Direktur Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan
  - d. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
- 11. Kementerian Koperasi dan UKM**
- a. Deputi Bidang Usaha Mikro
  - b. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
  - c. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Riza Damanik
  - d. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok
  - e. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi
  - f. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
- 12. Kementerian Kelautan dan Perikanan**
- a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
  - b. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
  - c. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - d. Direktur Jenderal Jasa Kelautan
  - e. Direktur Usaha dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - f. Direktur Perizinan dan Kenelayanan
  - g. Direktur Perencanaan Ruang Laut
  - h. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN**
- a. Direktur Jenderal Tata Ruang
  - b. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
  - c. Kepala Biro Hukum
- 14. Kementerian Dalam Negeri**
- a. Direktur Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan
  - b. Direktur Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah
  - c. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Ditjen Bid. Adm Kewilayahan
  - d. Kepala Biro Hukum
- 15. Kementerian Agama**
- a. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
- 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
- a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
  - b. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
  - c. Kepala Biro Hukum

**17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

- a. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- b. Direktur Jenderal Cipta Karya
- c. Direktur Bina Penataan Bangunan
- d. Kepala Biro Hukum

**18. Kementerian Perhubungan**

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

**19. Kementerian Pertanian**

- a. Direktur Jenderal Perkebunan
- b. Direktur Sawit dan Aneka Palma
- c. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- d. Direktur Perbenihan Perkebunan

**20. Sekretariat Wakil Presiden**

- a. Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing
- b. Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
- c. Deputy Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Wawasan Kebangsaan

**21. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

- a. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

**22. Kementerian Pendidikan dan Budaya**

- a. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

**23. Kementerian Sosial**

- a. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

**24. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

- a. Deputy Bidang Kebijakan Strategis

**25. Kementerian Kesehatan**

- a. Kepala Biro Hukum

**26. Lembaga Kebijakan Pengelola Barang/Jasa Pemerintah**

- a. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
- b. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

**27. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

- a. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal
- b. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- c. Ketua Tim Digitalisasi JPIY

**28. Badan Pengawas Obat dan Makanan**

- a. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

**29. Otoritas Jasa Keuangan**

- a. Deputy Direktur Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan
- b. Direktur Hubungan Bilateral dan Regional

**30. Dewan Kawasan Ekonomi Khusus**

- a. Sekretaris Jenderal Dewan Ekonomi Khusus
- b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
- c. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

**31. Badan Bank Tanah**

- a. Deputy Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah
- b. Deputy Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tanah

**32. Dewan Perwakilan Rakyat**

- a. Kepala Badan Keahlian

**33. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS)**

- a. Sekretaris BPH Migas

**34. Pusat Studi Pancasila UGM**

- a. Ketua Pusat Studi Pancasila
- b. Staf Pusat Studi Pancasila

SUSUNAN ACARA LAUNCHING BUKU

| Kamis, 17 Oktober 2024 |  |  |
|------------------------|--|--|
| Waktu                  | Acara  | Keterangan   |
| 08.00 – 09.00          | Registrasi Peserta   |  |
| 09.00 – 09.15          | <i>Opening Ceremony</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyanyikan Lagu Indonesia Raya</li> <li>Doa</li> </ul> | Dipandu MC   |
| 09.15 – 09.30          | Pembukaan  | Sambutan Ketua Satgas UU Cipta Kerja   |
| 09.30 – 10.30          | Diskusi Panel “Harmonisasi Kebijakan dan Transformasi Keberlanjutan: Jejak Langkah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja”   | Moderator:<br>Dimas Oky Nugroho,<br>Ketua Pokja Strategi Sosialisasi<br><br>Narasumber:<br>1. Thomas Djiwandono,<br>Wakil Menteri Keuangan RI<br>2. Arif Budimanta,<br>Sekretaris Satgas Undang-Undang Cipta Kerja<br>3. I Ktut Hadi Priatna,<br>Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi |
| 10.30 – 12.00          | Tanya Jawab  | Dipandu moderator  |
| 12.00 – 12.15          | Penutupan  |  |
| 12.15 – 13.00          | Makan Siang  |  |
| 13.00 – 15.00          | Penyelesaian Administrasi  |  |